

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 73 PADA LAPORAN KEUANGAN PT ABC  
DALAM MENINGKATKAN RELEVANSI LAPORAN KEUANGAN**



**NAMA : DOMINICO YAPPY**

**NIM : 126231020**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 73 PADA LAPORAN KEUANGAN PT ABC  
DALAM MENINGKATKAN RELEVANSI LAPORAN KEUANGAN**



**NAMA : DOMINICO YAPPY**

**NIM : 126231020**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 73 PADA LAPORAN KEUANGAN PT ABC  
DALAM MENINGKATKAN RELEVANSI LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**




**Dominico Yappy**

**126231020**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**



**Dr. Jonnardi, Drs. Ak., M.M., CA., CPA., BAP**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang sewa pada laporan keuangan PT ABC dan dampaknya terhadap relevansi laporan keuangan. PSAK 73, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, menggantikan PSAK 30 dan mengadopsi IFRS 16, mengharuskan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam neraca keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan laporan keuangan tahunan dari tahun 2019 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 menyebabkan peningkatan signifikan pada total aset dan liabilitas perusahaan, sementara ekuitas menurun karena pengakuan beban bunga dan depresiasi aset hak guna. Penerapan PSAK 73 meningkatkan transparansi dan relevansi laporan keuangan, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kewajiban sewa perusahaan, yang membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Namun, tantangan dalam penerapan PSAK 73 meliputi kebutuhan penyesuaian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelatihan staf. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar PT ABC meningkatkan sistem pelaporan keuangan, melakukan pelatihan berkelanjutan bagi staf, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan mereka. Evaluasi kinerja keuangan secara berkala dan audit eksternal yang rutin juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK 73.

**Kata Kunci:** PSAK 73, Laporan Keuangan dan Relevansi.

## **ABSTRACT**

*This research analyzes the application of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 73 concerning leases in PT ABC's financial statements and its impact on the relevance of financial statements. PSAK 73, which came into effect on January 1 2020, replaced PSAK 30 and adopted IFRS 16, requiring the recognition of right-of-use assets and lease liabilities in the financial balance sheet. This research uses a descriptive qualitative approach with data obtained through interviews and annual financial reports from 2019 to 2023. The research results show that the implementation of PSAK 73 causes a significant increase in the company's total assets and liabilities, while equity decreases due to the recognition of interest expenses and depreciation of rights assets. To use. The implementation of PSAK 73 increases the transparency and relevance of financial reports, providing a more accurate picture of a company's lease obligations, which helps users of financial statements make better economic decisions. However, challenges in implementing PSAK 73 include the need to adjust accounting and financial reporting systems as well as staff training. Based on these findings, it is recommended that PT ABC improve its financial reporting system, conduct ongoing training for staff, and maintain good communication with stakeholders to increase their trust. Periodic financial performance evaluations and routine external audits are also required to ensure compliance with PSAK 73.*

**Keywords:** PSAK 73, Financial Statements dan Relevance.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar pada Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Jonnardi, Drs. Ak., M.M., CA., CPA., BAP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 26 Juni 2024

Dominico Yappy

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Teoritis.....	8
2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.....	8
2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73.....	8
2.2 Laporan Keuangan.....	13
2.3 Relevansi Laporan Keuangan.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	17
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	18
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	18
3.5 Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1 Hasil Penelitian.....	20
4.2 Pembahasan.....	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	30
5.1 Kesimpulan.....	30
5.2 Saran.....	31
REFERENSI.....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Industri Terdampak Penerapan PSAK 73.....	5
Tabel 1.2 Perkembangan Akun Terdampak PSAK 73.....	6
Tabel 2.1 Aset dan Liabilitas Hak Guna Usaha.....	12
Tabel 3.1 Jenis, Metode dan Teknik Penelitian.....	17
Tabel 3.2 Variabel Indikator Skala.....	18
Tabel 4.1 Data Hasil Penelitian.....	20
Tabel 4.2 Perbandingan Aset Sebelum dan Sesudah PSAK 73.....	21
Tabel 4.3 Perbandingan Liabilitas Sebelum dan Sesudah PSAK 73.....	22
Tabel 4.4 Perbandingan Ekuitas Sebelum dan Sesudah PSAK 73.....	23
Tabel 4.5 Dampak Transparansi Penerapan PSAK 73.....	25
Tabel 4.6 Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Rasio Keuangan.....	25
Tabel 4.7 Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Laba Bersih dan EBITDA...	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penggunaan Sewa pada Perusahaan Sektor Jasa di Indonesia.....	3
--	---



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan keuangan merupakan dokumen yang memuat sejumlah keterangan berbasis finansial dalam suatu korporasi untuk periode akuntan tertentu, berfungsi sebagai perwujudan evaluasi atas kinerja dari korporasi yang bersangkutan tersebut. Lebih lanjut mengenai pihak yang berkesinambungan dengan aspek kepentingan ataupun pengguna dari keterangan yang sudah tertuang melalui sajian laporan ini memiliki keterkaitan dengan landasan untuk mengambil putusan dari perspektif ekonomi baik untuk kepentingan perbaikan atas keadaan di periode sebelumnya ataupun untuk melakukan serangkaian tindakan perencanaan di masa mendatang. Relevansi informasi yang tertuang melalui sajian laporan keuangan merefleksikan kualitas informasi yang dipublikasi oleh korporasi dalam menyajikan sejumlah value atas perusahaan dengan keakuratan yang maksimal kepada pihak pembaca maupun mereka yang memang bersinggungan dengan aspek pengambilan suatu putusan. Hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya kualitas atas relevansi yang termuat melalui sajian informasi menduduki aspek krusial bagi pihak pengguna atas laporan keuangan tersebut. Hal ini karena apa saja yang tertuang dalam relevansi laporan keuangan akan memberikan efek atau pengaruh terkait putusan yang diambil oleh pihak penggunanya. Laporan keuangan dengan nilai atas relevansinya cenderung tinggi sudah pasti memiliki kecakapan untuk menerangkan sejumlah keterangan berbasis finansial dari pihak korporasi yang ada sangkut pautnya oleh tindakan investasi, value dari perusahaan terkait bahkan return yang didapatkan para investor terkait. Keterangan atau informasi yang dinilai memiliki konotasi yang buruk maupun menyesatkan tentu akan mendatangkan efek merugikan bagi pihak investor maupun pemilik modal. Oleh karena itu, untuk melindungi hak pemodal, diterapkanlah PSAK 73 yang berkaitan dengan sewa.

Melalui sajian laporan berbasis keuangan pihak korporasi diwajibkan mengikuti SAK alias Standar Akuntansi Keuangan guna memberikan kepastian bahwa laporan yang telah dihasilkan tersebut memang dapat dipercayai atas dasar skema adopsi sejumlah prinsip secara general yang dapat diterima. Satu dari banyaknya standarisasi Yang berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2020 mengacu ke

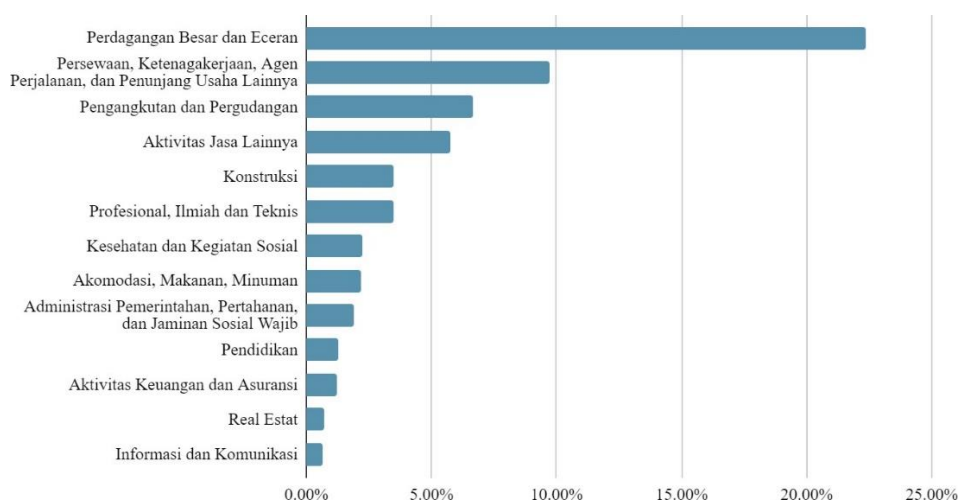
PSAK 73: sewa yang mengadopsi IFRS 16 dan mekanisme pengaturan terkait sewa tersebut. Pada dasarnya PSAK ini menjadi komponen yang hendak menggantikan sejumlah standarisasi sebelumnya termasuk PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi – Insentif, ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa, dan ISAK 25: Hak atas Tanah. Penerapan PSAK ini dirancang untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyajikan informasi yang relevan dan mencerminkan transaksi secara akurat. Implementasi dari PSAK ini sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kepastian jika pihak penyewa ataupun persewa menyajikan sejumlah keterangan yang memiliki relevansi cukup kuat dan merefleksikan transaksi dengan akurat. Informasi tersebut menjadi fondasi bagi pihak pengguna atas pelaporan finansial dalam kepentingan untuk memberikan penilaian atas efek sewa terkait posisi finansial, kinerja dari keuangan itu sendiri, bahkan arus kas terkait entitasnya. (IAI, 2020).

Menyinggung soal kontrak sewa dapat diartikan sebagai perwujudan perjanjian yang melibatkan pihak penyewa diberikan semacam hak khusus oleh pihak pemilik aset demi kepentingan penggunaan aset tertentu dalam jangka waktu yang sudah disepakati dengan kewajiban pihak penyewa harus membayarkan sewa kepada pemilik asetnya. Adapun klasifikasi dari sewa sendiri terbagi kedua kategori pokok yakni sewa operasi dan sewa pembiayaan. Pengertian dari sewa operasi mengacu pada aspek persewaan secara berjangka pendek yang mana tidak ada unsur perpindahan atas kepemilikan aset, sedangkan yang dimaksud dengan sewa pembiayaan mengacu pada tindakan penyewaan secara berjangka panjang dengan menitikberatkan aspek substansial untuk kepentingan transfer hak kepemilikan atas aset kepada pihak penyewanya.

Penggunaan pilihan sewa untuk memberikan pemenuhan atas sejumlah unsur kebutuhan dari korporasi terkait aset yang memberikan sifat mendukung aktivitas operasional secara komprehensif menjadi satu strategi yang dinilai efektif untuk mengedepankan tata kelola atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Memilih untuk menyewa aset dapat menjadi pilihan yang lebih efisien, terutama jika aset tersebut memiliki nilai yang signifikan. Opsi sewa dapat menjadi solusi untuk mengatasi

keterbatasan ekuitas perusahaan, karena tidak memerlukan pengeluaran modal secara besar yang sekaligus untuk meraup sejumlah aset dengan potensi menghadirkan pendapatan secara berkesinambungan.

Merunut pada keterangan yang sudah termaktub dalam pedoman yang disampaikan oleh IASB atau Dewan Standar Akuntansi Internasional, mengenai regulasi sewa, terdapat perubahan kebijakan dari standar IAS 17 ke IFRS 16. Fokus utama dalam pemilihan opsi sewa untuk mendukung operasional perusahaan telah berubah. Namun, terdapat kendala dalam tren ini, dimana lebih dari 85% dari totalan atas penilaian sewa pada suatu korporasi dengan melibatkan totalan nilai USD 3,3 triliun nampaknya tidak terakumulasi secara pencatatan dalam mekanisme pelaporan keuangan saat menerapkan standar IAS 17 (IASB, 2016). Standar IAS 17 memberikan keleluasaan bagi pihak korporasi untuk melakukan pemilihan atas opsi penyewaan baik secara operasional ataupun dari segi pembiayaannya tanpa ada syarat spesifik tertentu. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwasanya sewa operasional memberikan keunggulan dalam mencatat nilai sewa di luar neraca keuangan, sehingga banyak perusahaan cenderung memilih opsi ini, terutama dalam kasus sewa dengan nilai besar, dengan tujuan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang positif dalam laporan keuangan. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah dan merugikan bagi investor karena informasi yang sebenarnya mengenai perusahaan, khususnya terkait dengan nilai aset yang disewa dan kewajiban sewa, tidak terungkap secara jelas dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan.



Sumber : Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

Gambar 1.1 Penggunaan Sewa pada Perusahaan Sektor Jasa di Indonesia

Menurut data yang dipresentasikan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), pada akhir tahun 2020, laporan pangsa pembiayaan menurut sektor ekonomi mengungkapkan bahwa penerapan prinsip sewa memiliki kontribusi yang signifikan, terutama di sektor perdagangan besar dan eceran, dengan proporsi sekitar 22,35% (OJK, 2020). Dalam konteks ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengeluarkan kebijakan baru untuk meningkatkan keterwakilan akuntansi atas transaksi sewa secara lebih efektif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Dalam usaha ini, PSAK 30 telah diteruskan oleh PSAK 73, yang sesuai dengan pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (2017), mengacu pada pedoman yang tertuang dalam IFRS 16.

Menyinggung soal perubahan kebijakan yang mengacu pada PSAK 73 memberikan syarat mutlak bahwa pihak korporasi pada saat melakukan perubahan atas pengakuan transaksi sewa, sebelumnya dianggap sebagai penyewaan operasional menjadi pembiayaan atau dikenal dengan kapitalisasi sewa. Secara khusus, di sektor korporasi ranah perdagangan yang sifatnya besar ataupun eceran yang menunjukkan minat tinggi terhadap transaksi sewa, diperkirakan akan terjadi peningkatan dalam penerapan metode ini setelah PSAK 73 diberlakukan. Hal ini didukung oleh sifat perusahaan dalam sektor tersebut yang memiliki aset tetap berharga tinggi, seperti properti dan peralatan. Hal ini didukung oleh sifat perusahaan dalam sektor yang sudah disebutkan sebelumnya dengan kepemilikan aset bersifat tetap dengan harga tinggi, misalnya properti ataupun peralatan. Tujuan dari pengenalan dan penerapan PSAK 73 adalah untuk menyatukan kesatuan antara model akuntansi yang mengharuskan *lessee* untuk mengupayakan klasifikasi terkait transaksi sewa operasional sebagai sewa pembiayaan yang pada tahapan sebelumnya dilaporkan sebagai titik operasionalnya secara penyewaan (Rahayu, Rahmawati, Hanif, 2022). Hal yang perlu digarisbawahi mengenai pencatatan sekaligus pelaporan atas transaksi sewa pembiayaan yang dikaitkan dengan keterangan PSAK 73 memiliki tujuan spesifik untuk menghadirkan sejumlah keterangan berbasis finansial yang memiliki akurasi dan relevansi kepada pihak penggunaannya, sehingga menjadi dasar bagi penilaian kinerja perusahaan dalam mengidentifikasi sejumlah transaksi sewa secara

tepat oleh para penyewa maupun pesewanya sekaligus untuk memaksimalkan kualitas dari putusan pihak manajerial terkait.

Implementasi PSAK 73 terkait sewa ke depan diharapkan akan menggantikan standar-standar akuntansi sewa yang sudah ada sebelumnya, seperti PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan Apakah Perjanjian Mengandung Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi - Insentif, ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Bentuk Legal Sewa, dan ISAK 25: Hak atas Tanah. Proses pengklasifikasi dan pengungkapan transaksi sewa mengalami perubahan yang signifikan dengan diberlakukannya PSAK 73. Perubahan ini memiliki dampak penting, terutama bagi penyewa yang sekarang diharuskan mengklasifikasikan sebagian besar transaksi sewa sebagai sewa pembiayaan. Selain itu, penyewa juga diwajibkan mencatat aset sewa dan kewajiban sewa di neraca, sedangkan pada sewa operasi, biaya sewa tetap dicatat di luar neraca. Hal ini tentu berbeda dengan PSAK 30 sebelumnya yang tidak memberikan pengakuan terhadap transfer risiko maupun kebermanfaatan atas kepemilikan aset dari pihak *lessor* ke *lessee*. (Sandi, dkk., 2020).

Djohan Pinnarwan, sebagai Ketua Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), menyoroti bahwa mencatat transaksi sewa dalam neraca memiliki dampak yang signifikan terhadap rasio keuangan seperti rasio hutang, pengembalian aset, dan parameter lainnya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan dalam utang dan nilai aset, sambil mengurangi ekuitas karena pengakuan utang di masa depan oleh *lessor*. Pada tahun 2017, PricewaterhouseCoopers (PwC) melakukan studi tentang dampak kapitalisasi sewa yang muncul seiring penerapan PSAK 73 Sewa sebagai bagian dari adopsi IFRS 16. Penelitian ini berfokus pada industri-industri yang sebelumnya telah mengikuti PSAK, dan akhirnya diwajibkan untuk menerapkan PSAK 73 sejak tanggal efektifnya. Hasil riset PwC menunjukkan bahwa penerapan IFRS 16 menghasilkan peningkatan signifikan dalam utang, total aset, dan pendapatan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITDA) sebesar 22%, 5%, dan 13% masing-masing dari total 3.199 entitas di seluruh dunia. Data ini memberikan gambaran tentang dampak penerapan PSAK 73 Sewa pada berbagai industri global:

Tabel 1.1 Data Industri Terampak Penerapan PSAK 73

<b>Industri</b>	<b>Liabilitas</b>	<b>Aset Total</b>	<b>EBITDA</b>
Retail	98%	22%	41%
Airlines	47%	15%	33%
Professional Services	42%	5%	15%
Health Care	36%	6%	24%
Wholesale	28%	5%	17%
Transport & Logistics	24%	7%	20%
Entertainment	23%	5%	15%

Sumber: *Global PwC Lease Capitalization Study* (2017)

Tabel di atas mengilustrasikan dampak penggunaan PSAK 73 di Indonesia pada beragam sektor industri. Contohnya, sektor ritel mengalami peningkatan signifikan dalam liabilitas sebesar 98% dan aset sebesar 22%. Industri penerbangan juga terkena dampak, dengan kenaikan liabilitas rata-rata mencapai 47% dan peningkatan aset sebesar 15%. Selain itu, sektor jasa profesional juga mengalami transformasi, dengan lonjakan liabilitas sebesar 42% dan peningkatan aset sebesar 5%. Perubahan ini disebabkan oleh transisi dari pengklasifikasi sewa operasional menjadi sewa pembiayaan, yang mewajibkan aset hak guna dan kewajiban sewa untuk dicatat dalam neraca, seperti halnya sewa untuk aset pesawat dan mesin di perusahaan penerbangan. Badan Pengawas Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat, yang dirujuk oleh IASB (2016), melaporkan bahwa perusahaan publik di AS memiliki aset sewa senilai sekitar \$1,25 triliun yang tidak tercantum dalam neraca mereka. Situasi serupa terjadi di Indonesia, seperti yang diperlihatkan oleh PT Garuda Indonesia Tbk yang sebelumnya mengikuti PSAK 30. Pada masa itu, aset pesawat mereka tercatat sebagai sewa operasional dan tidak tercermin dalam laporan keuangan mereka. Hal ini menciptakan kesan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih rendah dari yang sebenarnya, padahal mereka memiliki kewajiban pembayaran sewa jangka panjang yang tidak terungkap.

Secara teknis, kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk mengindikasikan potensi kebangkrutan, karena mereka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya (Merdeka, 2021). Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN II, menegaskan bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada bulan September 2021 mencatatkan defisit sebesar USD 2,8 miliar. Mayoritas utang perusahaan berasal dari beban sewa pesawat yang sebelumnya tidak tercatat dengan akurat dalam laporan

keuangan. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 73 menggambarkan kondisi aktual perusahaan. Penurunan dalam neraca keuangan tidak hanya disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan sewa operasional, tetapi juga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan penjualan dan biaya leasing yang melebihi kapasitas, akibat ketidakmampuan dalam manajemen jenis pesawat dan rute perjalanan yang kurang menguntungkan namun memiliki biaya operasional yang besar.

Tabel 1.2 Perkembangan Akun Terdampak PSAK 73

Nama Perusahaan	Akun	2019	2020	Selisih Peningkatan	Persentase
PT Garuda Indonesia Tbk	Aset lancar	\$ 1.133.892.533	\$ 536.547.176	\$ -597.345.357	-53%
	Aset tidak lancar	\$ 3.321.783.241	\$ 10.253.433.231	\$ 6.931.649.990	209%
	Total aset	\$ 4.455.675.774	\$ 10.789.980.407	\$ 6.334.304.633	142%
	Liabilitas jangka pendek	\$ 3.257.836.267	\$ 4.294.797.755	\$ 1.036.961.488	32%
	Liabilitas jangka panjang	\$ 477.216.616	\$ 8.438.206.899	\$ 7.960.990.283	1668%
	Total liabilitas	\$ 3.735.052.883	\$ 12.733.004.654	\$ 8.997.951.771	241%
	Ekuitas	\$ 720.622.891	\$ -1.943.024.247	\$ -2.663.647.138	-370%
PT AirAsia Indonesia Tbk	Aset lancar	Rp 945.905.221.392	Rp 172.660.668.664	\$ -773.244.552.728	-82%
	Aset tidak lancar	Rp 1.667.164.853.540	Rp 5.907.855.417.088	\$ 4.240.690.563.548	254%
	Total aset	Rp 2.613.070.074.932	Rp 6.080.516.085.752	\$ 3.467.446.010.820	133%
	Liabilitas jangka pendek	Rp 2.007.253.622.193	Rp 4.957.130.972.939	\$ 2.949.877.350.746	147%
	Liabilitas jangka panjang	Rp 403.689.193.414	Rp 4.033.796.913.178	\$ 3.630.107.719.764	899%
	Total liabilitas	Rp 2.410.942.815.607	Rp 8.990.927.886.117	\$ 6.579.985.070.510	273%
	Ekuitas	Rp 202.127.259.325	-Rp 2.910.411.800.365	\$ -3.112.539.059.690	-1540%
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk	Aset lancar	\$ 5.397.236	\$ 5.669.424	\$ 272.188	5%
	Aset tidak lancar	\$ 55.704.051	\$ 48.220.929	\$ -7.483.122	-13%
	Total aset	\$ 61.101.287	\$ 53.890.353	\$ -7.210.934	-12%
	Liabilitas jangka pendek	\$ 21.944.991	\$ 26.756.737	\$ 4.811.746	22%
	Liabilitas jangka panjang	\$ 3.354.749	\$ 12.155.164	\$ 8.800.415	262%
	Total liabilitas	\$ 25.299.740	\$ 38.911.901	\$ 13.612.161	54%
	Ekuitas	\$ 35.801.547	\$ 14.978.452	\$ -20.823.095	-58%
PT Jaya Trishindo Tbk	Aset lancar	Rp 83.695.056.368	Rp 147.384.406.503	\$ 63.689.350.135	76%
	Aset tidak lancar	Rp 109.503.926.904	Rp 188.391.546.185	\$ 78.887.619.281	72%
	Total aset	Rp 193.198.983.272	Rp 335.775.952.688	\$ 142.576.969.416	74%
	Liabilitas jangka pendek	Rp 49.378.265.088	Rp 133.722.885.753	\$ 84.344.620.665	171%
	Liabilitas jangka panjang	Rp 18.365.324.219	Rp 69.924.395.314	\$ 51.559.071.095	281%
	Total liabilitas	Rp 67.743.589.307	Rp 203.647.281.067	\$ 135.903.691.760	201%
	Ekuitas	Rp 125.455.393.965	Rp 132.128.671.621	\$ 6.673.277.656	5%

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan (diolah)

Implementasi PSAK 73 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa akun dalam laporan keuangan, seperti aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas perusahaan. Data dari laporan keuangan PT AirAsia Indonesia Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk, dan PT Jaya Trishindo Tbk untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang mencolok dalam nilai aset lancar, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan total aset. Namun, terdapat penurunan yang signifikan dalam nilai aset lancar dan ekuitas, bahkan mencapai nilai negatif dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum PSAK 73 diterapkan.

Dalam studi yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2017 mengenai dampak kapitalisasi sewa akibat penerapan PSAK 73, terungkap bahwa perubahan dalam perlakuan sewa operasi berkontribusi pada peningkatan nilai kewajiban dan aset perusahaan, sementara nilai ekuitas mengalami penurunan. Fenomena ini juga memberikan dampak signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan, yang dapat berarti peningkatan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini menyoroti bahwa sebagian besar operasional perusahaan dibiayai melalui utang, dengan kenaikan rasio utang pada perusahaan penerbangan menimbulkan pertanyaan penting mengenai dampak kebijakan utang pada entitas tersebut.

Kebijakan utang adalah strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membiayai operasionalnya melalui sumber dana eksternal yang diterbitkan oleh manajemen sebagai penambahan modal. Ini mencerminkan perbandingan antara modal perusahaan dan utang jangka panjang yang digunakan untuk mendanai operasional dan investasi. Pengukuran jumlah utang sering dilakukan dengan memperhitungkan rasio utang terhadap ekuitas. Kebijakan utang ini tidak hanya mempengaruhi manajemen laba perusahaan tetapi juga menjadi tolok ukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Pada tahun 2020, PT ABC, yang bergerak di sektor pembangunan dan pengelolaan jalan tol, mulai menerapkan PSAK 73 mengenai sewa. Perubahan ini terlihat dari pengakuan baru atas aset hak-guna dan liabilitas sewa dalam laporan keuangannya. PT ABC melakukan peninjauan ulang terhadap semua kontrak sewa, termasuk yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Dengan adopsi PSAK 73 yang baru menggantikan PSAK 30, perusahaan menghadapi tantangan untuk memahami aturan baru ini. Tidak hanya itu, implementasi PSAK 73 ini juga berlangsung di tengah pandemi COVID-19 pada tahun yang sama. Merunut pada sajian yang tersaji dalam poin latar belakang di atas, maka penetapan untuk tajuk riset ini yakni " Analisis Penerapan PSAK 73 pada Laporan Keuangan PT ABC dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan"



## REFERENSI

- Ahmad, Jumal. 2018. *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (Revisi 2009). Penyajian Laporan Keuangan, 01(01), 1–79.*
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73 Tentang Sewa.*
- Duwi Rahayu, Imelda Dian Rahmawati, Aisha Haif (2022). *Pembentukan Model Pengakuan Sewa Yang Ideal Berdasarkan PSAK 73 Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Transportasi di Indonesia.*
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- Fushila, V., Rosianti, R., dan Prawira, I. F. A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan), 5(2), 229-238.*
- Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, D. E. K. (2019). *Financial Accounting 9th Edition*. Wiley.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Martani, D. (2016). *Akuntansi dan Akuntabilitas*.
- Subramanyam, K. R. dan Wild, J. J. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukma, M. A. P. dan Yadnyana, I. K. (2014). Komparasi Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Adopsi IFRS. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(4): 659-688.